

Babak Belur Pendidikan Indonesia karena MBG

Isnawati Hidayah • Media Wahyudi Askar





Babak Belur Pendidikan Indonesia karena MBG

oleh: **Isnawati Hidayah, Media Wahyudi Askar**

“

MBG tetap direncanakan berlanjut pada 2027, dengan sekitar Rp240T atau mengambil porsi 29,3% dari anggaran pendidikan. Pemerintah tidak peka, gagal belajar, dan lalai menjalankan tanggung jawabnya.

Sejak Sudaryono dilantik, setidaknya sudah ada 1.557 korban dugaan keracunan terkait MBG. Namun alih-alih membongkar akar masalah dan memastikan pertanggungjawaban, kegagalan sistemik justru dikubur di balik panggung pencitraan, dan bahkan tega plesiran ke Milan atas nama tugas negara.

Pendidikan dikorbankan untuk menambal kebijakan yang sejak awal tidak becus dikelola. Anggarannya dirampas, waktu belajarnya dikorbankan, keselamatan siswanya dipertaruhkan, gurunya dijadikan tester makanan sekaligus tenaga logistik mengurus ompreng dan makanan sisa.

”

Perayaan 81 tahun Kemerdekaan RI justru dibayangi ketidakpekaan pemerintah terhadap kegagalan sistemik MBG. Salah satu yang paling nyata adalah waktu, energi, dan pikiran guru yang dikorbankan untuk mengurus MBG. Guru yang seharusnya mengajar justru dibebani penerimaan makanan, pembagian ompreng, pengawasan distribusi, hingga persoalan logistik. Sekolah berubah menjadi perpanjangan tangan operasional MBG, sementara guru menanggung konsekuensi dari desain kebijakan yang bermasalah. Mirisnya, dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan MBG akan terus dilaksanakan dan bahkan dalam pidatonya, tidak disebutkan sama sekali terkait kesejahteraan guru.

Temuan Utama

1

Dalam skenario tinggi (kondisi dimana MBG datang terlambat, banyak anak menolak untuk makan, harus membersihkan ompreng dan mengumpulkan makanan sisa yang berlebihan), guru kehilangan waktu hingga 249 jam per tahun yang harusnya untuk mengajar, setara 55 hari sekolah atau 11 minggu pembelajaran, hanya untuk mengurus MBG di sekolah.

2

MBG memangkas 13–68 menit waktu belajar setiap hari. Sebagian besar tersita untuk mengelola logistik, bukan proses pembelajaran.

Waktu Guru yang Terbuang untuk Mengurus Ompreng dan MBG

Dalam memo ini, yang dihitung adalah waktu neto, yang dikalkulasi dengan pendekatan seperti dibawah ini:

$$\text{Waktu MBG neto} = \text{total waktu untuk MBG (kotor)} - \text{jam istirahat yang terserap}$$

Tabel 1

Penghitungan Waktu yang Terbuang dari 3 Skenario

Komponen	Rendah	Tengah	Tinggi
Persiapan & distribusi ompreng ke kelas	5	10	15
Cuci tangan & berdoa	3	5	5
Makan	15	20	25
Beres-beres: kumpul ompreng, buang sisa, tata ke keranjang	5	10	15
Transisi / settling kembali fokus ke pelajaran	3	5	8
Waktu tunggu akibat keterlambatan (rata-rata tertimbang)	2	6	15
Total kotor	33	56	83
Dikurangi jam istirahat terserap	-20	-20	-15
NETO merampas jam pelajaran	13	36	68

Sumber: diolah peneliti (2026)

Catatan: skenario Tinggi memakai istirahat terserap yang lebih kecil (15 menit) karena pada sekolah dengan keterlambatan parah, MBG jatuh di luar slot istirahat sehingga daya serapnya justru berkurang. Program MBG tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga menyita waktu belajar yang tidak sedikit. Yang hilang bukan hanya waktu makan, melainkan waktu guru membagikan ompreng, waktu siswa mencuci tangan, membereskan sisa makanan, hingga waktu kelas kembali kondusif untuk belajar. Bahkan setelah memperhitungkan jam istirahat, sekolah masih kehilangan sekitar 13–68 menit pembelajaran setiap hari (lihat Tabel 1). Ironisnya, sebagian besar waktu tersebut bukan digunakan untuk kegiatan belajar maupun makan, melainkan untuk mengelola logistik program. Waktu yang dibutuhkan akan semakin fluktuatif jika ada keterlambatan pengiriman MBG ke sekolah.



Tabel 2

Kalkulasi Jam Belajar Hilang dengan 3 Skenario¹

Indikator	Rendah	Tengah	Tinggi
Jam belajar hilang (menit/hari)	13	36	68
= porsi jam belajar harian	4,8%	13,4%	25,2%
= jam pelajaran (JP) hilang per hari	0,34	0,95	1,80
Jam hilang per siswa per tahun	48 jam	132 jam	249 jam
Setara hari sekolah hilang per tahun	10,6 hari	29,4 hari	55,5 hari
Setara minggu sekolah hilang per tahun	2,1 mgg	5,9 mgg	11,1 mgg

Sumber: diolah peneliti (2026)

Yang hilang bukan sekadar beberapa menit setiap hari, melainkan akumulasi waktu belajar yang sangat besar. Dalam skenario menengah, seorang siswa kehilangan sekitar 132 jam belajar atau hampir satu bulan sekolah setiap tahun (lihat Tabel 2). Pada skenario tinggi, kehilangan itu mencapai 249 jam, setara lebih dari 55 hari sekolah atau sekitar 11 minggu pembelajaran. Ironisnya, waktu yang hilang tersebut bukan digunakan untuk kegiatan belajar, melainkan untuk menopang operasional program makan di lingkungan sekolah.

Janji Kosong Audit dan Evaluasi Menyeluruh yang Transparan

Pada 15 Juni 2026, BGN menghentikan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah dan berjanji mengaudit total seluruh dapur. Enam pekan kemudian, sekolah sudah kembali masuk, MBG sudah kembali berjalan, dan publik tidak pernah menerima satu pun dokumen hasil audit itu. Yang publik terima adalah pergantian kepala badan untuk ketiga kalinya dalam dua bulan, serangkaian konferensi pers berisi angka yang tidak pernah direkonsiliasi satu sama lain, dan rencana menuntaskan 13.000 dapur baru². Pada akhir Juli 2026, 707 siswa dan guru SMKN 6 Semarang diduga keracunan MBG, juga beberapa dugaan keracunan lainnya yang terjadi sebelumnya. Kemudian pada 1 Agustus 2026, Sudaryono melakukan kunjungan ke korban dan suspend sementara SPPG sebagai pola berulang merespon kasus keracunan pangan yang sudah sistemik.

Yang lebih mengkhawatirkan, rangkaian gimmick tersebut justru menutupi persoalan yang belum terselesaikan. Audit belum dipublikasikan, penyebab puluhan ribu kasus keracunan belum dijelaskan, tetapi pemerintah sudah mengumumkan percepatan

- ¹ Parameter konversi: 1 jam pelajaran (JP) rata-rata tertimbang = 38 menit (PAUD 30 / SD 35 / SMP 40 / SMA 45); beban belajar harian rata-rata tertimbang = 270 menit (4,5 jam); hari efektif sekolah = 220 hari/tahun
- ² Disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli usai Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

penyelesaian sekitar 13.000 SPPG dan mempertahankan target ekspansi puluhan ribu dapur. Meskipun, akhirnya pernyataan terkait ekspansi SPPG tersebut menjadi blunder untuk pemerintah. Akibatnya, perhatian publik bergeser dari pertanyaan mendasar, mengapa program ini gagal menjamin keamanan pangan dan akuntabilitas anggaran, ke siklus berita harian yang dipenuhi kunjungan lapangan, ancaman penutupan, dan konferensi pers. Keberhasilan terbesar dari pelaksanaan MBG selama 1,5 tahun ke belakang adalah menghabiskan anggaran dan membiarkan kegagalan sistemik direplikasi dalam skala yang lebih besar.

Keputusan MK dalam Gugatan MBG menjadi Kekalahan Telak Pendidikan Indonesia

Berdasarkan keputusan MK terhadap Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026 membuka risiko ratusan triliun rupiah dari alokasi pendidikan terus dialihkan ke MBG sepanjang 2026–2027. Dana yang seharusnya memperkuat mutu sekolah, guru, dan pembelajaran berisiko terus dipakai untuk program tanpa bukti kuat perbaikan gizi yang berkelanjutan.

Putusan MK tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai kemenangan, tapi lebih tepat dibaca sebagai penundaan yang dilegalkan. Selama 2026 dan 2027, penggerogotan anggaran pendidikan tetap berjalan, dan yang publik terima sebagai gantinya adalah kunjungan lapangan dan konferensi pers.

Setiap rupiah anggaran pendidikan yang dialihkan ke MBG adalah rupiah yang tidak digunakan untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, atau memperkuat kualitas pembelajaran. Ironisnya, pengorbanan itu dilakukan ketika pemerintah sendiri belum mampu menunjukkan secara terbuka bahwa MBG telah menghasilkan manfaat yang sebanding dengan besarnya dana yang diambil dari sektor pendidikan. Studi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa sekitar 49,5% ruang kelas SD di Indonesia masih mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 10,8% lainnya berada dalam kondisi rusak berat. Di tingkat SMP, angka kerusakan mencapai 42,7%, sementara sekitar sepertiga ruang kelas SMA dan SMK juga masih mengalami kerusakan.



Rekomendasi

1 Hentikan MBG, bubarkan SPPG dan BGN

2 Jangan mengotak-atik dan kembalikan anggaran pendidikan yang diambil untuk MBG sesegera mungkin.

3 Fokuskan intervensi gizi dengan program yang sudah ada, dengan perbaikan dan penguatan. Memastikan keterlibatan ibu, perempuan dan keluarga dalam penyiapan makanan bergizi untuk anak.





MEMO
MBG # 5

Babak Belur Pendidikan Indonesia karena MBG

Oleh
Isnawati Hidayah
Media Wahyudi Askar

© 2026 CELIOS
CELIOS memegang hak cipta publikasi ini,
termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak.

Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau
seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id



CELIOS

**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id

W : celios.co.id